

**IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN PERSYARATAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
DI POS PELAYANAN PELABUHAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN CABANG BENOA**



Oleh

NI PUTU TIA VALENTINA DHARMA PUTRI

NIM 2215713147

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2025**

**IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN PERSYARATAN
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)
DI POS PELAYANAN PELABUHAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN CABANG BENOA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI PUTU TIA VALENTINA DHARMA PUTRI

NIM 2215713147

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Implementasi SOP Penerbitan Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pos Pelayanan Pelabuhan Nusantara Pengambangan Cabang Benoa”** tepat pada waktunya

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Diploma III Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, yakni di antaranya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.Com., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan menyediakan fasilitas selama penulis menjalani perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.

2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, S.E., M.B.A., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Widiantra, S.Psi., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Dra. Ni Luh Putu Inten Rumini, M.Agb selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan, arahan, bimbingan, saran, serta dukungan yang tak gentar selama penyusunan tugas akhir.
5. Ibu Ni Nyoman Teristiyani Winaya S.E., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan, arahan, bimbingan, saran, serta dukungan yang tak gentar selama penyusunan tugas akhir.
6. Bapak Roisul Maarif, S.Pi. selaku Koordinator di Kantor PPN Pengambangan yang telah memberikan dukungan dan data yang diperlukan selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak M. Haidar Hamid, S.St.Pi selaku Syahbandar di Kantor PPN Pengambangan yang telah memberikan dukungan dan data yang diperlukan selama penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada seluruh *staff* dan ASN PPN Pengambangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi kesempatan kepada

penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi selama penyusunan tugas akhir ini.

9. Kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama melakukan Praktik Kerja Lapangan.
10. Saudara, teman, sahabat dan semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan sumbangan pikiran positif untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca baik yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali ataupun di luar lingkungan Politeknik Negeri Bali.

KEJURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 15 Agustus 2025



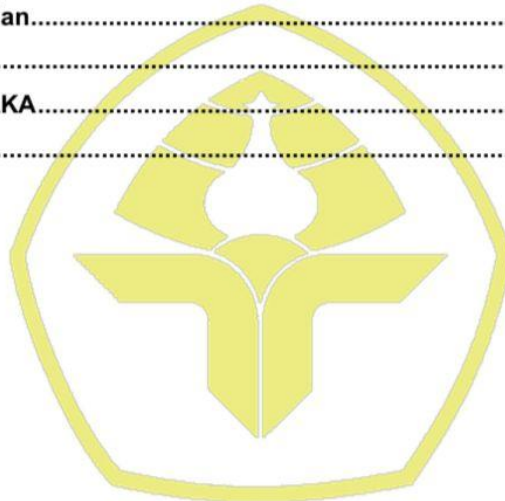
Ni Putu Tia Valentina Dharma Putri

Penulis

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN PERSYARATAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI POS PELAYANAN PELABUHAN NUSANTARA	
PENGAMBENGAN CABANG BENOA	1
IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN PERSYARATAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI POS PELAYANAN PELABUHAN NUSANTARA	
PENGAMBENGAN CABANG BENOA	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR	i
<i>Lembar Persetujuan dan Pengesahan</i>	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir	4
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir	5
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
A. Administrasi	12
B. Sistem Informasi	15
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	17
D. Prosedur	21
E. Flowchart	24
BAB III	30
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Keadaan Umum Pelabuhan Benoa	30
B. Letak Geografis	31
C. Fasilitas Pelabuhan Umum Benoa	31
D. Sejarah Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan	36
E. Bidang Usaha	38

F. Struktur Organisasi.....	39
BAB IV	43
PEMBAHASAN.....	43
A. Kebijakan Perusahaan	43
B. Analisis dan Intrepetasi Data	47
BAB V	78
KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif...	10
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PPN Pengambengan	42
Gambar 4. 1 Flowchart SOP Surat Persetujuan Berlayar Kantor PPN Pengambengan	48
Gambar 4. 2 Surat Laik Operasi.....	57
Gambar 4.2 1 Proses Log-in pada Aplikasi Teman SPB	50
Gambar 4.2 2 List Nama Kapal.....	51
Gambar 4.2 3 Formulir Permohonan Keberangkatan	52
Gambar 4.2 4 Gambar Formulir Entri	52
Gambar 4.2 5 Formulir STBLKK	53
Gambar 4.2 6 Form Upload Dokumen	54
Gambar 4. 3 Data Terbit Dokumen Persetujuan Berlayar P.U Benoa	63
Gambar 4. 4 Formulir Cek Teknis dan Nautis	70
Gambar 4. 5 Surat Pernyataan Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar.....	73
Gambar 4. 6 Surat Persetujuan Berlayar	74
Gambar 4. 7 Kartu Kendali Pelayanan Persetujuan Berlayar.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah perairan seluas lebih dari 3,5 juta km² dan memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Kegiatan pelayaran sangat diperlukan sehingga diperlukan pula prasarana transportasi laut berupa pelabuhan khususnya pelabuhan perikanan dalam menggali potensi sumber daya laut. Menurut Undang-Undang RI No. 9 tahun 1985 pasal 18 bahwa pelabuhan perikanan sebagai prasarana penunjang untuk meningkatkan hasil produksi laut (Triatmodjo, 2010). Di mana potensi perikanan bidang penangkapan sebesar 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing di bawah naungan PT/Perusahaan yang ada di Pelabuhan.

Pelabuhan Benoa merupakan salah satu cabang pelabuhan di bawah pengelolaan dan pengusahaan PT. (Persero). Terdapat Pos Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan di Pulau Bali yang di mana indikatornya dimulai dari saat perencanaan pengembangannya, yang telah didasari kajian dari berbagai aspek. Mulai dari penentuan lokasi, penetapan tipe dan dimensi bangunan pelabuhan sesuai dengan keadaan sumber daya alamnya, hubungan dengan rencana pengembangan wilayah setempat, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pesisir setempat, dampak sosial ekonomi wilayah setempat dan sebagainya. Indikator lain ditunjukkan dengan telah berfungsinya berbagai fasilitas yang ada. Pos Pelayanan Pelabuhan Pengambangan Nusantara sebagai pusat kegiatan perikanan, dilengkapi dengan Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melayani para nahkoda atau pemilik kapal untuk kedatangan dan keberangkatan kapal serta masyarakat perikanan lainnya. Petugas dari PPN Pengambangan yang melaksanakan tugas di pos pelayanan

terpadu antara lain Syahbandar Perikanan untuk pelayanan SPB, Pengelola layanan operasional bertugas melayani STBLKK, SHTI dan Logbook, Petugas pelayanan jasa tambat labuh serta bendahara penerima PNBP.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas Syahbandar terhadap kapal yang akan melakukan keberangkatan melaut atau meninggalkan pelabuhan guna memastikan bahwa kapal, awak kapal, serta muatannya secara teknis administratif yang telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Dalam jumlah penerbitan dokumen SPB tentunya memiliki jumlah yang tidak sedikit, jumlah penerbitan dapat mempengaruhi suatu kajian karena adanya kendala saat pengumpulan berkas-berkas. Data Terbit Dokumen Persetujuan Berlayar Periode 2024-2025 di Pos Pelayanan Pengembangan Nusantara Pelabuhan Benoa. Sebanyak 1.978 Dokumen Persetujuan Berlayar yang terbit dimulai dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2025 atas perizinan dari Pusat.

Implementasi SOP di PPN Pengembangan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi melalui aplikasi Teman SPB, yang mengintegrasikan proses input data, validasi dokumen, dan persetujuan oleh Syahbandar secara digital.

Dalam PP No. 27 Tahun 2021 dan PP No. 31 Tahun 2021, kewenangan delegasi diberikan kepada instansi teknis seperti KKP dan Kemenhub untuk mengatur lebih lanjut tentang penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan. Dengan proses pendelegasian ini belum sepenuhnya berlangsung secara efektif sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun yaitu. Bagaimana SOP pelaksanaan Penerbitan Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi SOP Penerbitan Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pos Pelayanan Pelabuhan Nusantara Pengembangan Cabang Benoa”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

Bagaimana SOP pelaksanaan Penerbitan Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PPN Pengembangan Cabang Benoa?

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui SOP pelaksanaan penerbitan SPB di PPN Pengembangan.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program studi DIII Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Selain itu, untuk menambah ilmu pengetahuan yang didapat saat PKL dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan kenyataan di dunia industri sehingga setelah lulus, memiliki pengalaman dan keterampilan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Kegunaan yang diperoleh Politeknik Negeri Bali adalah dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi, bahan pustaka, serta sumber informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali di masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan/Intansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan keputusan dan kesempurnaan dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dalam mencapai tujuan perusahaan

atau instansi. Selain itu, berguna untuk kelancaran kerja dan kualitas perusahaan/instansi di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pos Pelabuhan Pelayanan Perikanan Nusantara Pengembangan Cabang Benoa yang bertempat di Br. Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Waktu Pelaksanaan Penelitian ini bersamaan dengan waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu selama 6 bulan dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah proses administrasi dan pendataan pada Sistem Persyaratan Persetujuan SPB dan STBLKK di PPN Pengembangan.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2021 : 13) jenis kualitatif adalah data yang berbentuk kata - kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi : Sejarah singkat PPN Pengembangan, Struktur Organisasi serta Profil dan Kinerja.

b. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diberikan dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan keterangan lisan dari Kesyahbandaran dan Pegawai di bagian sistem informasi dan administrasi PPN Pengembangan. Adapun penjelasan terkait data primer dan data sekunder menurut Elvera & Astarina (2021: 66), yaitu :

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui media perantara. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bentuk datanya berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer penelitian ini adalah dokumen berupa Profil dan Kinerja PPN Pengembangan.

2) Data Sekunder

Menurut Arikunto (2010), data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari sumber aslinya. Peneliti mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara. Pada dasarnya data ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan

atau tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah catatan perusahaan, situs, *website*, jurnal.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Menurut Noor (2015 : 140) observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mencatat kegiatan dan data yang memiliki kesinambungan dengan pendataan dan pencatatan oleh pelayanan di PPN Pengambangan.

2) Wawancara

Menurut Elvera & Astarina (2021 : 72) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden, dengan kata lain perbincangan antara narasumber atau responden dengan peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Kesyahbandaran yaitu Bapak M. Haidar Hamid, S.St.Pi. Pertanyaan yang diajukan berfokus mengenai pengecekan berkas dan dokumen Persetujuan Perizinan Berlayar. Wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 6 Januari 2025.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan,

dan pengorganisasian informasi data untuk mendapatkan berbagai macam data yang diperlukan demi kelengkapan sebuah penelitian. Data yang diperoleh berupa berkas – berkas arsip yang dapat dikelola dari objek penelitian dan mendukung penelitian.

4. Triangulasi

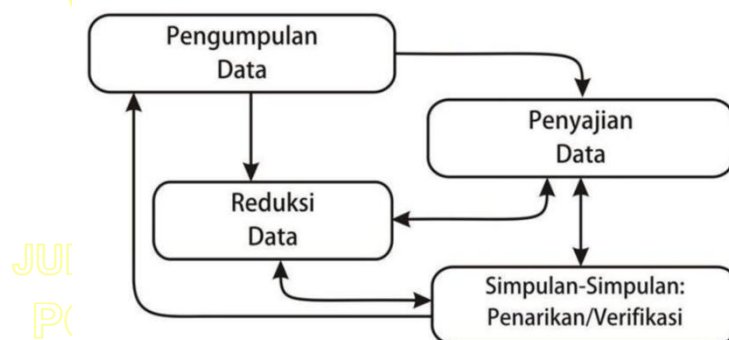
Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengembalian data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Hikmawati, 2017:84).

Secara umum Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Kanjeng Mariyadi, 2019), analisis ini merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk menganalisis data kualitatif. Jenis pendekatan ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data kualitatif dengan

tujuan menemukan tema, pola, dan sebuah hubungan antar konsep yang muncul dari data. Aktivitas analisis data kualitatif ini dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, agar data tersebut jenuh. Ukuran kejenuhan data ini ditandai dengan data yang tidak lagi memperoleh data atau informasi baru. Adapun teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan utama yang saling berkaitan dan berulang sehingga dilakukan secara bertahap untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang data yang diperoleh. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 1. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Keterangan:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi meliputi berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data mentah menjadi bentuk yang lebih terkelola dan mudah dianalisis. Data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, atau dokumen, dengan memperoleh hasil data yang tidak semuanya relevan. Dalam tahap ini, memerlukan pemilihan data yang penting, membuang data yang tidak relevan, serta menyusun data sesuai dengan kategori tertentu.

3. Penyajian Data

Penyajian data mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ini merupakan proses interpretasi data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *SOP Penerbitan Persyaratan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)* di Pos Pelayanan Pelabuhan Nusantara Pengembangan Cabang Benoa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOP telah berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan alur kerja yang sistematis dan berbasis digital, yang mampu meningkatkan efisiensi serta ketepatan waktu dalam pelayanan kepada pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan. Temuan utama dari analisis data lapangan menunjukkan bahwa penggunaan sistem aplikasi *Teman SPB* berperan signifikan dalam mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan dokumen SPB, yang sebelumnya dilakukan secara manual, menjadi lebih praktis dan transparan serta mengurangi potensi kesalahan administrasi yang kerap terjadi akibat pengolahan data yang tidak terstandar. SOP yang diterapkan dalam proses penerbitan SPB mencakup tahapan-tahapan yang jelas dan terstruktur, dimulai dari

pengajuan permohonan oleh pemilik kapal, pengecekan kelengkapan dan validitas dokumen seperti SIPI/SIKPI, SLO, STBLKK, sertifikat keselamatan, dan logbook, hingga ke tahap pemeriksaan teknis kapal oleh petugas syahbandar, yang hasil akhirnya dituangkan dalam dokumen SPB yang telah disahkan dan dicetak. Penerapan sistem Teman SPB yang terintegrasi dengan sistem informasi KKP serta dukungan dari Syahbandar dan instansi teknis lain telah membuktikan bahwa transformasi digital dalam layanan publik sektor kelautan bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memberikan hasil yang konkret dalam hal percepatan layanan dan akuntabilitas proses penerbitan dokumen pelayaran. Secara teknis, pelaksanaan SOP ini tidak hanya bertujuan sebagai formalitas administrasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol keselamatan pelayaran yang sah secara hukum, di mana verifikasi laik laut, laik simpan, dan laik tangkap kapal menjadi unsur utama yang menentukan apakah sebuah kapal boleh meninggalkan pelabuhan atau tidak, sehingga SPB menjadi dokumen yang sangat strategis dari sisi keselamatan, legalitas, dan perlindungan lingkungan laut. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat teori administrasi publik modern yang menekankan pentingnya

efisiensi layanan, digitalisasi proses, dan akuntabilitas sistem, sekaligus berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai implementasi e-government di sektor pelabuhan dan perikanan tangkap di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa sistem pelayanan berbasis SOP dan aplikasi digital seperti Teman SPB dapat menjadi model yang dapat direplikasi di pelabuhan perikanan lainnya, dengan penyesuaian lokal, sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan minim risiko kesalahan prosedural.

B. Saran

1. Untuk Praktisi dan Pelaksana Layanan Publik (Petugas Pelabuhan dan Syahbandar)

Disarankan agar seluruh petugas administrasi dan teknis di lingkungan PPN Pengembangan Cabang Benoa diberikan pelatihan berkala dan pendampingan intensif mengenai penggunaan aplikasi *Teman SPB*, khususnya dalam aspek teknis digitalisasi dan standar kelengkapan dokumen, agar dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan

serta meminimalisir kesalahan dalam proses input, verifikasi, dan penerbitan dokumen SPB.

2. Untuk Manajemen Instansi Terkait (KKP, Kemenhub, PPN Pengambengan)

Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP SPB, baik melalui monitoring kinerja sistem maupun umpan balik dari pengguna layanan (stakeholders), sehingga dapat dilakukan pembaruan SOP yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan dan kemajuan teknologi informasi.

3. Untuk Pengusaha Perikanan dan Pemilik Kapal

Disarankan agar pemilik kapal dan pengurus perusahaan perikanan meningkatkan pemahaman administratif dan digital melalui sosialisasi atau workshop yang difasilitasi instansi, terutama dalam hal pengisian formulir digital, kelengkapan dokumen yang sah dan berlaku, serta tata cara input dokumen pada sistem Teman SPB untuk memperlancar proses perizinan dan menghindari penolakan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjeli, M., Fadillah, R., & Latifah, D. (2022). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Banci, K. P. S., Dirhamsyah, D., & Sutria, Y. (2024). *Prosedur pengurusan pergantian bendera MV. Atlas Link menjadi bendera Indonesia di kantor syahbandar Belawan oleh PT. Multi Jaya Samudera Cabang Belawan*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, 3(1). <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2743>
- Elvera, D., & Astarina, I. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fahmi, I. (2017). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmawati, R. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Unesa University Press.
- Isha, M. I., Kurniawati, R., & Mahendra, M. A. (2023). *Sistem Informasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi.
- Kamaluddin. (2017). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Deepublish.

- Kanjeng Mariyadi. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kuncoro, M. (2022). *Sistem Informasi dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pahlevi, D. A., & Astutik, Y. (2021). *Algoritma dan Pemrograman Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- Putra, F. A. R., Rahmawati, M., & Purwitasari, D. (2025). *Analysis of the application of digitization of sailing approval letters in clearance out activities (Study on KSOP Class III Labuan Bajo)*. Jurnal Maritim Malahayati, 6(1). <https://doi.org/10.70799/jumma.v6i1.107>
- Ridho, M., & Maydianto, I. (2021). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Rusdiana, A., & Zaqiah, Q. Y. (2022). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,*

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, S. A. B., Suparman, S., & Said, A. (2024). *Pengurusan surat*

persetujuan muat barang berbahaya di kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Jurnal Transformasi Bisnis

Digital, 1(6). <https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v1i6.373>

Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Syafiie, M., & Welasari, S. (2017). *Administrasi Perkantoran Modern*.

Yogyakarta: Deepublish.

Triatmodjo, B. (2010). *Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Wahyuni, S. (2017). Dalam Irawati & Satri, *Pengantar Manajemen Operasi*.

Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, S. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI